

# ANALISIS FAKTOR EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

Retno Febriyastuti Widyawati<sup>1\*</sup>, Mei Handriati Setiyani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Semarang, <sup>2</sup>Mitra Karsa Utama

<sup>1</sup>Semarang, <sup>2</sup>Surabaya

## Jurnal Riptek

Volume 19 No. 1 (65 – 76)

Tersedia online di:

<http://riptek.semarangkota.go.id>

## Info Artikel:

Diterima: 12 Mei 2025

Disetujui: 23 Juni 2025

Tersedia online: 30 Juni 2025

## Kata Kunci:

angkatan kerja, ekonomi, kemiskinan, vokasional

## Korespondensi penulis:

\*[retnofw@mail.unnes.ac.id](mailto:retnofw@mail.unnes.ac.id)

**Abstract.** Poverty is a complex social and economic problem. This poverty problem also occurs especially in urban areas, such as Semarang City, which acts as the capital city of Central Java Province and is the center of regional economic growth. Although this city has a strategic role, there are still a large number of people living below the poverty line. Poverty remains an issue that needs serious attention from various parties. This study aimed to analyze economic factors that affect the poverty rate in Semarang City for the period 2011-2023. The independent variables studied include the Labor Force Participation Rate (TPAK), Human Development Index (HDI), and Gross Regional Domestic Product (GRDP), with the poverty rate as the dependent variable. The analysis method used is multiple linear regression with the Ordinary Least Squares (OLS) approach, using secondary data from the Central Statistics Agency. The study results show that TPAK has a positive coefficient and a significant effect on the poverty rate. HDI has a negative coefficient and significantly affects the poverty rate. GRDP has a positive coefficient and does not significantly affect the poverty rate. Based on these findings, the Semarang City Government should focus on improving the quality of human resources through education and skills training relevant to the labor market's needs. In addition, efforts are needed to ensure that economic growth can be enjoyed by all levels of society so that poverty reduction policies will be effective.

## Cara mengutip:

Widyawati, R. F. & Setiyani, M. H. 2025. Analisis Faktor Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Semarang. Vol. 19 No. 1 Halaman (65-76). <http://riptek.semarangkota.go.id>

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi yang sangat kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini sangat sering dihadapi oleh semua negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini. Di Indonesia penanggulangan kemiskinan menjadi skala prioritas dalam pembangunan nasional. Berbagai program kegiatan dilakukan atau dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun meskipun berbagai program kegiatan dan upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, ternyata permasalahan kemiskinan ini tetap menjadi tantangan dan hambatan signifikan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tiga alasan utama kemiskinan menjadi permasalahan pembangunan ekonomi regional, yaitu pertama menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan kemiskinan berdampak secara langsung pada rendahnya produktivitas masyarakat. Individu yang hidup dalam garis kemiskinan sering kali memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan dan kesehatan yang semuanya merupakan faktor penting dalam

meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Akibatnya, potensi yang dimiliki oleh individu tersebut terganggu dan tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan juga menimbulkan *multiplier effect* karena individu akan mengurangi daya belinya terhadap barang dan jasa yang akan berdampak pada menurunnya permintaan terhadap barang dan jasa sehingga mengakibatkan terhambatnya investasi dan ekspansi bisnis lokal. Hal ini akan menciptakan siklus yang sulit sekali untuk diputus, sehingga kemiskinan akan menghambat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat juga akan memperburuk kemiskinan.

Alasan kedua yaitu meningkatkan ketimpangan sosial dan ketidakstabilan sosial politik. Hal ini karena ketika sebagian besar penduduk merasa terpinggirkan dan tidak merasakan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi, akan menimbulkan rasa ketidakpuasan, protes sosial, bahkan dapat menimbulkan konflik. Ketidakstabilan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, namun menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Adanya

ketimpangan yang tinggi dapat juga merusak kohesi sosial dan kepercayaan antar kelompok di dalam masyarakat.

Alasan ketiga yaitu membebani anggaran dan sumber daya pemerintah. Kemiskinan meluas akan menuntut pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya untuk berbagai program bantuan sosial, subsidi, dan bentuk layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Meskipun program ini penting untuk membantu masyarakat miskin, alokasi anggaran yang besar untuk bantuan sosial dapat mengurangi dana yang tersedia di pemerintah untuk investasi dalam infrastruktur, inovasi, serta sektor produktif lainnya yang sebenarnya dana tersebut dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu juga, beban administratif dalam mengelola program-program tersebut juga akan menguras kapasitas institusional pemerintah daerah, menghambat efisiensi dan efektivitas kebijakan pemerintah.

Permasalahan kemiskinan terjadi di wilayah perkotaan seperti yang terjadi di Kota Semarang. Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi regional. Namun, dibalik peran strategis tersebut, ternyata masih terdapat kehidupan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, persentase penduduk miskin hampir mengalami tren yang sama setiap tahunnya.

**Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di Kota Semarang Tahun 2011-2023**

Tahun	Persentase (%)
2011	5.68
2012	5.13
2013	5.25
2014	5.04
2015	4.97
2016	4.85
2017	4.62
2018	4.14
2019	3.98
2020	4.34
2021	4.56
2022	4.25
2023	4.23

Sumber: BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa secara umum persentase penduduk miskin di Kota Semarang mengalami penurunan dari 5,68% pada tahun 2011 menjadi 4,23% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas berbagai program

yang telah dilakukan atau dilaksanakan pada program penanggulangan kemiskinan di kota tersebut. Selama periode 2011-2019, terjadi penurunan bertahap dalam persentase penduduk miskin dari 5,68% menjadi 3,98%. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin menjadi meningkat menjadi 4,34% dan naik lagi menjadi 4,56% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengganggu aktivitas ekonomi dan menyebabkan kehilangan pekerjaan serta penurunan pendapatan masyarakat. Setelah tahun 2021 terjadi pemulihan pasca pandemi, persentase penduduk miskin mulai menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 4,25% dan pada tahun 2023 menjadi 4,23%.

Persentase penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang yang cenderung stabil setiap tahunnya menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan efektivitas program bantuan sosial serta kebijakan pemulihan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Campur tangan pemerintah yang menggunakan dua strategi yakni mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan program perlindungan sosial dan subsidi. Program strategis untuk menurunkan kemiskinan, dengan fokus pada peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Langkah-langkah ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.

Untuk meningkatkan TPAK, Pemerintah Kota Semarang telah mengembangkan program pelatihan kerja yang menjangkau masyarakat luas, termasuk dalam pelatihan vokasional maupun kewirausahaan. Adanya kedua program tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta memberikan fasilitas penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun non formal. Selain itu juga pemerintah menyediakan berbagai akses kredit untuk masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional dengan mendorong pembentukan koperasi dan usaha produktif lainnya.

Adanya program tersebut menjadikan angka TPAK di Kota Semarang mengalami peningkatan. TPAK yang meningkat mengindikasikan bahwa tenaga kerja yang tersedia juga akan mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya tenaga kerja akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat serta akan mengakibatkan angka kemiskinan di Kota Semarang menurun.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Prayitno & Yustie, 2020) yang mengatakan bahwa langkah awal pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan adalah memberikan bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dilanjutkan dengan pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) untuk meningkatkan prospek lapangan kerja. (Kristiyanto & Widodo, 2017) juga menjelaskan bahwa efisiensi secara umum dalam penggunaan anggaran daerah akan memberikan hasil terbaik seperti penurunan angka kemiskinan. Selain itu menurut (Rizwanul, 2004) berpendapat bahwa dengan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin, masyarakat tersebut dapat mencapai produktivitas yang cenderung tinggi sehingga mengakibatkan penghasilannya pun akan meningkat. Hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun ternyata penelitian yang dilakukan oleh (Nurkhin dkk, 2024) menunjukkan bahwa TPAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Artinya meskipun nilai TPAK meningkat ataupun menurun, tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan atau peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini bisa saja disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu peningkatan TPAK tidak diikuti dengan tersedianya lapangan kerja yang layak, tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan tenaga kerja yang rendah dapat menyebabkan tenaga kerja terjebak dalam pekerjaan dengan upah yang rendah sehingga tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Indikator dinamika pembangunan sosial dan ekonomi lainnya yang saling mempengaruhi terhadap kemiskinan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM menunjukkan perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.

Pada tahun 2023, IPM Kota Semarang mencapai 84,43 meningkat dari sebelumnya yaitu 84,08. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam tiga sektor yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Sedangkan secara bersamaan juga, pada tahun 2023 persentase penduduk miskin yaitu 4,23% dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 4,03%. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa terdapat korelasi positif antara peningkatan IPM dengan tingkat penurunan kemiskinan, meskipun terdapat peningkatan IPM dan penurunan persentase jumlah penduduk miskin, ternyata jumlah absolut penduduk miskin mengalami

peningkatan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yaitu bertambahnya jumlah individu yang masuk dalam kategori miskin meskipun persentasenya mengalami penurunan.

Malindar (2020) menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang besar dalam pembangunan suatu daerah juga merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin.

Zahra dkk., (2024) berpendapat bahwa sumber daya manusia akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Adapun kualitas manusia dapat diukur melalui IPM. Sukron & Yasin (2021) juga menjelaskan bahwa peningkatan kualitas manusia dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan, yaitu pembangunan pendidikan juga akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang, pembangunan kesehatan harus mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan. Disisi lain, hasil penelitian Rusdi (2023) menjelaskan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Artinya meskipun IPM mengalami peningkatan, hal tersebut tidak secara langsung dapat menurunkan angka kemiskinan. Hal ini bisa disebabkan berbagai faktor, seperti ketimpangan distribusi pembangunan, kualitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak.

Selain TPAK dan IPM ada faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). BPS menyatakan bahwa PDRB sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan unit ekonomi disuatu daerah. Setiyani & Kristiyanto (2023) menjelaskan bahwa PDRB dapat dikatakan sebagai jumlah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit di daerah atau wilayah tertentu. Secara teoritis, peningkatan PDRB seharusnya berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan melalui penciptaan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Data menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kota Semarang mengalami peningkatan dari Rp 135,33 juta pada tahun 2022

menjadi Rp 156,57 juta pada tahun 2024. Selama periode yang sama, persentase penduduk miskin menurun dari 4,23% pada tahun 2023 menjadi 4,03% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan TPAK, IPM, dan PDRB terhadap di Kota Semarang. Kebaruan penelitian ini yaitu karena sebgain besar penelitian sebelumnya hanya menganalisis dalam skala nasional atau provinsi. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan analisis penelitian di Kota Semarang saja yang memiliki dinamika ekonomi dan sosial tersendiri sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh TPAK, IPM, dan PDRB terhadap kemiskinan di Kota Semarang dari tahun 2011 sampai dengan 2023. Jangka rentang waktu yang panjang selama 13 tahun, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tren jangka panjang dan perubahan struktural yang mempengaruhi kemiskinan di Kota Semarang. Hal ini dapat memberikan perspektif historis yang lebih kompleks dan komprehensif dibandingkan jika menggunakan data dalam rentang waktu yang lebih pendek. Penelitian ini juga mengintegrasikan variabel ekonomi makro yaitu PDRB, variabel sosial yaitu IPM, dan ketenagakerjaan (TPAK) untuk memahami gambaran secara holistik tentang determinan kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar Pemerintah Kota Semarang dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan, sehingga pemerintah dapat mengarahkan program pembangunan dan program intervensi sosial yang lebih tepat sasaran. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam angkatan kerja sebagai upaya untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

## **Tinjauan Pustaka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

TPAK mengukur proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Menurut Sianturi dkk., (2024) TPAK menunjukkan ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja.

Semakin tinggi TPAK, semakin besar jumlah angkatan kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Faktor-faktor yang memengaruhi TPAK yaitu pertama tingkat pendidikan. dimana pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sehingga mendorong partisipasi dalam angkatan kerja. Kedua yaitu upah minimum, dimana upah minimum adalah kebijakan upah yang dapat memengaruhi keputusan individu untuk masuk atau keluar dari angkatan kerja. Ketiga kondisi ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga meningkatkan TPAK. Keempat faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan tanggung jawab keluarga yang dapat memengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.

TPAK merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, sebaliknya, TPAK yang rendah dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam akses ke pekerjaan atau kurangnya motivasi untuk bekerja, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.

## **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita (Sayifullah & Gandasari, 2016). Metode penghitungan IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari tiga dimensi, yaitu:

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks Kesehatan} + \text{Indeks Pendidikan} + \text{Indeks Pengeluaran})$$

Berdasarkan nilai IPM, tingkat pembangunan manusia dikategorikan sebagai berikut:

- kategori rendah jika nilai  $IPM < 60$ ,
- kategori sedang jika nilai  $60 \leq IPM < 70$ ,
- kategori tinggi jika nilai  $70 \leq IPM < 80$
- kategori sangat tinggi jika  $IPM \geq 80$

Adapun fungsi IPM yaitu pertama untuk mengukur keberhasilan pembangunan yaitu dengan menilai sejauh mana suatu negara atau wilayah telah berhasil meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Kedua untuk perbandingan antarwilayah sehingga memungkinkan perbandingan tingkat pembangunan manusia antarnegara atau antarwilayah. Ketiga sebagai perencanaan kebijakan untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (Amaliyah & Arif, 2023). Nilai tambah bruto dihitung sebagai selisih antara nilai output (barang dan jasa akhir) dengan biaya antara yang digunakan dalam proses produksi. PDRB dapat dihitung atas dasar harga berlaku (nominal) dan harga konstan (riil). Harga berlaku mencerminkan nilai ekonomi pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil dengan menghilangkan pengaruh inflasi.

Terdapat tiga pendekatan utama dalam penghitungan PDRB:

- Pendekatan Produksi yaitu menghitung nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut
- Pendekatan Pengeluaran yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk konsumsi akhir, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).
- Pendekatan Pendapatan yaitu menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan.

PDRB memiliki berbagai kegunaan dalam analisis ekonomi dan perencanaan pembangunan yaitu untuk mengukur kinerja ekonomi dengan cara menilai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu, sebagai perbandingan antarwilayah untuk membandingkan tingkat kemajuan ekonomi antarwilayah atau antarprovinsi, dan digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan. Selain itu juga dapat digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi dengan cara melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB, dapat dianalisis struktur ekonomi suatu wilayah dan identifikasi sektor unggulan.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks, yang telah menjadi perhatian utama dalam studi pembangunan dan kebijakan publik (Putri dkk., 2022). Pengertian kemiskinan menurut Bank Dunia dan UNDP menekankan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional yaitu mencakup tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Pendekatan ini mengakui bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan meningkatkan pendapatan, tetapi memerlukan intervensi kebijakan yang dilakukan secara komprehensif (Girsang, 2011). Kemiskinan dikategorikan menjadi dua yaitu :

- Kemiskinan absolut yaitu kemiskinan di mana individu atau kelompok tidak memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Garis kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan standar minimum kebutuhan hidup yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang terjadi akibat ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat, di mana individu dianggap miskin jika pendapatannya jauh di bawah rata-rata pendapatan masyarakat sekitarnya.

### **Metoda Analisa**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, sebagai metode ilmiah atau *scientific* karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional, serta sistematis.

Data penelitian ini menggunakan data *time series* atau runtut waktu tahun 2011-2023. Obyek penelitian yaitu Kota Semarang. Pemilihan Kota Semarang sebagai obyek penelitian dikarenakan Kota Semarang memiliki fluktuasi signifikan dalam tingkat kemiskinan selama periode 2011-2023. Selain itu Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki beberapa karakteristik seperti daerah perkotaan yang kompleks dalam hal pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan ketimpangan sosial. Selain itu juga Kota Semarang menjadi lokasi implementasi berbagai program sosial dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor tersebut, Kota Semarang merupakan obyek penelitian yang tepat

dan strategis untuk dijadikan penelitian mengenai kemiskinan periode 2011-2023.

Model penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan pendekatan *Ordinary Least Squares (OLS)*. Model regresi linear berganda ini melibatkan lebih dari satu variabel independen untuk mengetahui arah atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Data yang dipakai yakni data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang dan berbagai sumber lainnya yang masih relevan. Model yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \epsilon_i \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

- Y : Kemiskinan
- i : Waktu
- $\beta_0$  : Intersep
- $\beta_{1, \dots, 3}$  : Parameter
- $X_1$  : TPAK
- $X_2$  : IPM
- $X_3$  : PDRB
- E : Error

Persamaan diatas menunjukkan variabel dependen (Y) yaitu kemiskinan yang diproksi dari persentase penduduk miskin dan variabel independen yaitu TPAK (X1), IPM (X2), dan PDRB (X3). Adapun definisi operasional untuk semua variabel tersebut yaitu :

- Kemiskinan (Y) yaitu proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Satuan persen.
- TPAK (X1) yaitu persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan total penduduk usia kerja. Satuan persen.
- IPM (X2) yaitu indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia dengan tiga dimensi dasar kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Satuan persen.
- PDRB (X4) yaitu total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu biasanya satu tahun. Satuan persen.

Untuk mendapatkan permodelan yang baik, penelitian ini harus memenuhi asumsi *Best Linier Unbiased Estimator (BLUE)*. Asumsi klasik yang digunakan yakni : Uji Multikolonieritas, Uji

Autokorelasi, Uji, Heteroskedastisitas, Uji Normalitas dan Uji Linearitas (Krida dkk., 2021)

Setelah memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran dalam asumsi klasik tersebut, langkah selanjutnya yakni dengan interpretasi hasil terhadap model yang sudah dibangun. Uji statistika yang digunakan dalam penelitian ini yakni uji parsial, uji simultan dan koefisien determinasi (Widyawati dkk., 2021).

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan permodelan (1) dan berikut ini yakni hasil uji asumsi klasik.

### 1. Uji Multikolonieritas

Bertujuan untuk mengetahui apakah persamaan model regresi yang digunakan peneliti mempunyai korelasi antar variabel independent dengan variabel dependennya. Uji ini dilakukan dengan cara melihat nilai/hasil VIF. Apabila nilai  $VIF < 10$  maka tidak terdapat multikolonieritas, sebaliknya jika nilai  $VIF > 10$  maka terjadi multikolonieritas (Hariani dkk., 2023).

**Tabel 2. Uji Multikolonieritas**

Variabel	Uncentered VIF	Centered VIF
TPAK	2592.972	1.180551
IPM	1431.745	1.136178
PDRB	8.594245	1.154284

Sumber: *Data diolah, 2025*

Berdasarkan hasil dari uji multikolonieritas pada tabel 2 diatas diketahui bahwa nilai dari variabel TPAK (X1), IPM (X2) dan PDRB (X3) mempunyai nilai  $VIF < 10$ . Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala multikolonieritas.

### 2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependen, sehingga tidak terjadi korelasi di antara pengamatan serta data observasi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan Uji Breusch Godfrey. Metode ini digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam residual model regresi. Adapun hipotesis nol ( $H_0$ ) tidak terdapat autokorelasi pada residu hingga ordo ke p. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) terdapat autokorelasi pada residu hingga ordo ke p. Interpretasi hasil jika nilai p value  $> 0,05$  maka terima  $H_0$  dan tolak  $H_a$ , artinya model penelitian tersebut tidak terdapat autokorelasi, sebaliknya jika nilai p value  $< 0,05$  maka tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$ , artinya terdapat autokorelasi

pada residual hingga ordo ke p. Hasil penelitian uji autokorelasi penelitian ini yaitu dijelaskan pada tabel 3.

**Tabel 3. Uji Autokorelasi**  
**Breusch Godfrey Serial Coreollation LM**

F- statistic	1,839366	Prob. F(2,6)	0,2382
Obs*R-squared	4,561009	Prob. Chi-Square(2)	0,1022

Sumber: *Data diolah, 2025*

Berdasarkan hasil dari uji autokorelasi pada tabel 3 diatas diketahui bahwa nilai Prob sebesar 0,2382, nilai p value ini lebih besar dari 0,05, maka terima Ho dan tolak Ha, artinya model penelitian tersebut tidak terdapat autokorelasi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui data yang digunakan oleh peneliti termasuk data yang memiliki penyimpangan atau tidak. Peneliti menggunakan Uji Glejser untuk mengetahui sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual. Hipotesis nol (Ho) tidak terdapat heteroskedastisitas (homokedastisitas), varians residual konstan di seluruh pengamatan. Hipotesis alternatif (Ha) terdapat terdapat heteroskedastisitas, varians residual tidak konstan di seluruh pengamatan. Intepretasi hasil jika nilai p value > 0,05 maka terima Ho dan tolak Ha, artinya model penelitian tersebut terdapat tidak terdapat heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai p value < 0,05 maka tolak Ho dan terima Ha, artinya terdapat heteroskedastisitas dalam model. Hasil penelitian uji autokorelasi penelitian ini yaitu dijelaskan pada tabel 4.

**Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas**  
**Uji Glejser**

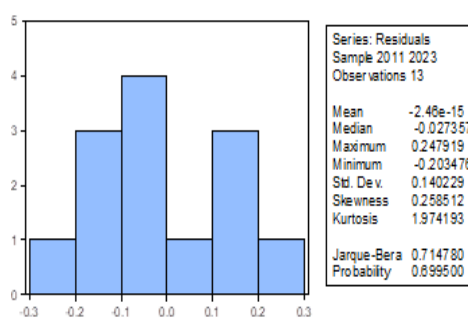
F- statistic	0,216137	Prob. F(3,9)	0,8828
Obs*R-squared	0,873650	Prob. Chi-Square(3)	0,8318

Sumber: *Data diolah, 2025*

Berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas pada tabel 4 diatas diketahui bahwa nilai Prob sebesar 0,8828, nilai p value ini lebih besar dari 0,05, maka terima Ho dan tolak Ha, artinya model penelitian tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas.

### 4. Uji Normalitas

Uj normalitas adalah untuk menentukan data yang telah terkumpul berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki residu yang terdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan jarque-bera. Adapun hipotesis nol (Ho) data terdistribusi normal. Hipotesis alternatif (Ha) yaitu data tidak mengikuti distribusi normal. Intepretasi hasil jika nilai JB > nilai kritis atau p value < 0,05 maka tolak Ho dan terima Ha, artinya tidak terdistribusi normal, sebaliknya jika JB < nilai kritis atau p value > 0,05 maka terima Ho dan tolak Ha, artinya data terdistribusi normal. Hasil penelitian uji normalitas penelitian ini yaitu dijelaskan pada gambar 1.



**Gambar 1. Uji Normalitas**

Sumber: *Data diolah, 2025*

Berdasarkan hasil dari normalitas pada gambar 1 diatas diketahui bahwa nilai Prob sebesar 0,6995, nilai p-value ini lebih besar dari 0,05, maka terima Ho dan tolak Ha, artinya model penelitian tersebut terdistribusi normal.

### 5. Uji Linearitas

Uji linearitas adalah uji dengan tujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji linear dalam penelitian ini menggunakan Ramsey RESET test dengan tujuan untuk mengetahui bentuk fungsi regresi tersebut tepat. Adapun hipotesis nol (Ho) model regresi berbentuk linear, sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah model regresi tidak berbentuk linear. Intepretasi hasil yaitu jika nilai p value > 0,05 maka Ho diterima Ha ditolak, artinya model regresi berbentuk linear, sebaliknya jika nilai p value < 0,05 maka Ho ditolak Ha diterima artinya model regresi tidak berbentuk linear. Hasil penelitian uji linearitas dijelaskan pada tabel 5.

**Tabel 5. Uji Linearitas**

	Value	Probabilty
t-statistic	0,047291	0,9634

F-statistic 0,002236 0,9634

Sumber: *Data diolah, 2025*

Berdasarkan hasil dari uji linearitas pada tabel 5 diatas diketahui bahwa nilai Prob sebesar 0,9634, nilai p value ini lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  terima dan  $H_a$  tolak, artinya model regresi berbentuk linear.

Setelah melakukan uji asumsi klasik dan model regresi yang dilakukan sudah memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), langkah selanjutnya dalam analisis statistik adalah melakukan pengujian hipotesis untuk melihat signifikansi model dan variabel independennya. Pengujian ini meliputi uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t.

Uji koefisien determinasi adalah uji untuk menjelaskan besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Uji ini menggunakan nilai  $R^2$  untuk mengukur proporsi total variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai adjusted  $R^2$  juga mempertimbangkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Adapun intepretasi hasilnya yaitu apabila nilai  $R^2$  tinggi dan mendekati 100 maka model tersebut dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam variabel dependen.

Uji f atau uji signifikansi simultan adalah uji untuk menguji pengaruh semua variabel bebas atau variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya atau variabel dependen. Hipotesis  $H_0$  atau ( $H_0$ ) yaitu tidak ada pengaruh simultan antara variabel dependen dan independen sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) yaitu ada pengaruh simultan antara variabel dependen dan independen. Intepretasi hasil yaitu jika F hitung lebih kecil dari F tabel ( $F_{hitung} < F_{tabel}$ ) atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ( $Sig > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak artinya tidak ada pengaruh simultan antara variabel dependen dan independen, begitu juga sebaliknya jika jika F hitung lebih besar dari F tabel ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ( $Sig < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima artinya ada pengaruh simultan antara variabel dependen dan independen.

Uji t adalah uji untuk menguji pengaruh variabel bebas atau variabel independen secara individual terhadap variabel terikatnya atau variabel dependen. Hipotesis  $H_0$  atau ( $H_0$ ) yaitu tidak ada pengaruh individual antara variabel dependen dan independen sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) yaitu ada pengaruh individual antara variabel dependen dan independen. Intepretasi hasil yaitu

jika t hitung lebih kecil dari t tabel ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ) atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ( $Sig > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak artinya tidak ada pengaruh individual antara variabel dependen dan independen, begitu juga sebaliknya jika jika t hitung lebih kecil dari t tabel ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ( $Sig < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima artinya ada pengaruh individual antara variabel dependen dan independen.

Hasil uji koefisien determinasi penelitian ini ditunjukkan pada tabel 6.

**Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi**

	Value
R-Squared	0,923125
Adjusted R-Squared	0,897500

Sumber: *Data diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 6 diatas nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,92, dimana nilai ini menunjukkan bahwa sekitar 92,3% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Artinya, model penelitian tersebut mampu menjelaskan sebagian besar dari perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Nilai adjusted R-squared sebesar 0.89 menunjukkan bahwa setelah penyesuaian, model maka model tersebut memiliki kemampuan menjelaskan variasi pada variabel dependen sebesar 89%, sedangkan sisanya 11% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

Hasil uji f dan uji t dalam penelitian ini disajikan pada tabel 7.

**Tabel 7. Hasil Uji f dan t**

Variable	Coefficient	t-Stat	Prob.
C	15.23286	5.960802	0.0002
X1	0.096030	2.881309	0.0181
X2	-0.211152	-10.11666	0.0000
X3	0.010761	0.484102	0.6399
F-Statistic	36,02435		
Prob(F-statistic)	0,000024		

Sumber: *Data diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 7 diatas, nilai uji f dengan melihat nilai probabilitas F-statistik sebesar  $0.000024 < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh simultan variabel TPAK (X1), IPM (X2) dan PDRB (X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel kemiskinan (Y).

Permodelan hasil regresi linear berganda secara matematis yakni sebagai berikut :

$$Y = 15.233 + 0.096 X_1 - 0.211X_2 + 0.011X_3 + \varepsilon_t \dots \dots \dots (2)$$

Intepretasi koefisien regresi diatas yaitu:

- Konstanta (intercept) sebesar 15,233. Hal ini menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen TPAK (X1), IPM (X2) dan PDRB (X3) bernilai nol, maka nilai Y sebesar 15,233 dengan asumsi ceteris paribus
- Koefisien TPAK (X1) sebesar 0,096, artinya jika terjadi peningkatan sebesar satu persen pada TPAK, dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,096 persen.
- Koefisien IPM (X2) sebesar -0,211 artinya jika terjadi peningkatan sebesar satu persen pada IPM, dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan Y sebesar 0,211 persen.
- Koefisien PDRB (X3) sebesar 0,011 artinya jika terjadi peningkatan sebesar satu persen pada PDRB, dengan asumsi variabel lainnya tetao, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,011.

Tabel 7 juga menunjukkan hasil uji t (uji signifikansi parsial) sebagai berikut:

- Hasil dari nilai probabilitas variabel TPAK (X1) sebesar  $0.0181 < 0.05$ , dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, artinya variabel TPAK (X1) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y).
- Hasil dari nilai probabilitas variabel IPM (X2) sebesar  $0.0000 < 0.05$ , dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, artinya variabel IPM (X2) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y).
- Hasil dari nilai probabilitas PDRB (X3) sebesar  $0.6399 > 0.05$ , dapat disimpulkan  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak, artinya variabel PDRB (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y).

## **Pembahasan**

### **Pengaruh TPAK terhadap Kemiskinan**

Variabel TPAK memiliki koefisien positif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan TPAK maka akan meningkatkan kemiskinan. Artinya peningkatan TPAK di Kota Semarang ternyata justru diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Fauziah dkk., (2021) mengatakan bahwa TPAK berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2010 sampai 2019edangkan hasil penelitian berbeda dikemukakan oleh Fikri & Suparyati (2017) yang menyatakan bahwa TPAK tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan harapan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kota. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti kualitas lapangan kerja yang tersedia yang masih rendah. Meskipun TPAK meningkat, namun tidak semua individu yang ada di Kota Semarang dapat masuk ke dalam angkatan kerja dan berhasil mendapatkan pekerjaan, penghasilan dan kesejahteraan yang layak. Sebagian besar mungkin saja mendapatkan pekerjaan bukan di sektor formal, namun di sektor informal yang umumnya masih berupah rendah serta tidak mempunyai jaminan sosial yang baik. Kondisi ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga masih termasuk ke dalam kategori miskin meskipun masyarakat tersebut bekerja.

Faktor lainnya bisa juga disebabkan karena peningkatan TPAK tidak diimbangi dengan adanya pertumbuhan lapangan kerja yang memadai sehingga hal ini bisa menyebabkan peningkatan pengangguran terbuka atau setengah menganggur. Hal ini dapat terjadi jika jumlah individu yang siap dan ingin bekerja ternyata melebihi jumlah pekerjaan yang tersedia di lapangan sehingga hal ini juga bisa meningkatkan resiko kemiskinan.

Peningkatan TPAK juga tidak selalu disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari segi keterampilan yang dimiliki oleh pekerja . Apabila keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pada pasar tenaga kerja maka akan terjadi *mismatch* dan tenaga kerja tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga hal ini berkontribusi pada peningkatan kemiskinan yang tinggi. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keterampilan tenaga kerja supaya upaya mengurangi angka kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

### **Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan**

Variabel IPM memiliki koefisien negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkorelasi dengan penurunan kemiskinan. Hal ini dikarenakan karena komponen atau dimensi IPM terbagi menjadi tiga, yaitu pendiidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Pada dimensi pendidikan, indikator yang digunakan yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Peningkatan pada indikator ini berarti

menunjukkan bahwa masyarakat Kota Semarang memiliki akses yang lebih baik pada sektor pendidikan. Pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga memberikan peluang yang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga akan mendapatkan upah/gaji yang layak yang pada akhirnya akan mampu mengurangi kemiskinan.

Komponen kesehatan pada IPM, yaitu angka harapan hidup. Angka harapan hidup ini mencerminkan kualitas layanan pada masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Apabila terjadi peningkatan pada aspek ini, berarti hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Definisi dari pelayanan kesehatan tersebut yaitu segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung oleh individu atau perorangan atau masyarakat khalayak umum untuk dapat memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun paliatif. Adapun jenis pelayanan ini bisa dalam pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan gangguan jiwa, dll. Pelayanan kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan individu atau masyarakat dapat bekerja secara efektif sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.

Faktor lainnya yaitu standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita. Masyarakat yang cenderung memiliki daya beli yang tinggi, cenderung memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya sehingga hal tersebut dapat mengurangi risiko kemiskinan.

Peningkatan IPM yang terjadi di Kota Semarang tahun 2011-2023 memiliki kontribusi pada penurunan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup masyarakat efektif dalam mengurangi kemiskinan. Pemerintah perlu terus mendorong kebijakan yang berfokus pada peningkatan IPM untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ristika dkk (2021) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai hasil yang membuktikan bahwa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan hasil penelitian Purboningtyas dkk., (2020) dan Sukron &

Yasin (2021) menjelaskan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap terhadap kemiskinan.

### **Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan**

Variabel PDRB memiliki koefisien positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. PDRB mengalami kenaikan atau peningkatan, namun tidak berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Beberapa faktor yang menjelaskan fenomena tersebut adalah pertama pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Peningkatan PDRB tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di masyarakat, jika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu saja, maka dampaknya terhadap kemiskinan masih kurang dan terbatas. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Pakpahan & Maria (2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Semarang periode 2002-2021. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Dama dan Lopian (2016) dan Nabawi (2020) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Faktor kedua yaitu PDRB yang meningkat mungkin saja di dorong oleh sektor-sektor yang tidak padat karya atau tidak banyak menyerap banyak tenaga kerja, akibatnya meskipun nilai PDRB meningkat, namun peluang bagi masyarakat untuk bekerja masih kecil, sehingga tidak mampu mengurangi kemiskinan. Hal ini juga akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah mungkin saja tidak merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sehingga tingkat kemiskinan tetap tinggi meskipun PDRB meningkat.

Faktor ketiga yaitu keterbatasan akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan mungkin saja tidak dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul akibat peningkatan PDRB. Hal ini menyebabkan masyarakat tetap berada dalam kondisi kemiskinan meskipun ekonomi daerah berkembang.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa TPAK memiliki koefisien positif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. IPM memiliki koefisien negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. PDRB memiliki koefisien positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan Pemerintah Kota Semarang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat agar kebijakan mengurangi kemiskinan menjadi efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, S., & Arif, M. (2023). Analisis Determinan Disparitas Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(2), 1–10. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i2.1811>
- Bintang Shavira Zahra, Renita Dafa Arta Mevia, Rizki Aria Sona, & Misfi Laili Rohmi. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Pada Priode 2012-2023. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(3), 01–15. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i3.111>
- Dama Himawan Yudistira, Agnes L Ch Lopian, J. I. S. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16*, 549–561.
- Fauziah, D. R., Juliprijanto, W., & Prakoso, J. A. (2021). Pengaruh Investasi, Pendidikan, Kesehatan, Dan Tpk Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2019. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 3(1), 53–68.
- Fikri, R. O., & Suparyati, A. (2017). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan Dan Gender Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Media Ekonomi*, 25(1), 43–56. <https://doi.org/10.25105/me.v25i1.5203>
- Girsang, W. (2011). *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*. BFP Universitas Pattimura.
- Hafiz Nabawi. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Kota Malang. *Oeconomicus Journal Of Economics*, 4(2), 104–117.
- Hariani, E., Widyawati, R. F., Muhammad, R. T., Dwimastadji W, M., & Dewa L, B. (2023). Pencegahan Stunting dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 949–956. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.3187>
- Krida, M., Medan, R., & Situmorang, I. R. (2021). *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya (JMBEP)*. 7(1), 37–51.
- Kristiyanto, S., & Widodo, S. (2017). Analisis Efisiensi Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota Di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 17(1), 1–12.
- Malindar, B. (2020). Analisis Determinam Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Journal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki*, 2(1), 1–12.
- Nurkhin, A., Rahman, Y. A., Fauzi, A. S., & Saputro, I. H. (2024). Analisis Pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. 5(2), 313–324. <https://doi.org/10.15294/baej.v5i2.12563>
- Pakpahan, K. H., & Maria, N. S. B. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2002-2021. 4(4), 59–70. <https://repofeb.undip.ac.id/11508/>
- Prayitno, B., & Yustie, R. (2020). Pengaruh Tenaga Kerja, IPM Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota Di Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16(1), 47. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v16i1.825>
- Purboningtyas, I., Sari, R., Guretno, T., Dirgantara, A., Dwi, A., & Al Haris, M. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Analysis of The Influence of Open Unemployment Levels and Human Development Index on Poverty in Central Java Province. *Jurnal Sains Dan Matematika Unpam*, 3(1), 81–88.
- Putri, F. Z., Karimi, K., Hamdi, M., Bakaruddin, B., & Rahayu, N. I. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri, Penanaman Modal Asing Dan Kemiskinan Terhadap Emisi Co2 Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(2), 221–228.

<https://doi.org/10.37859/jae.v12i2.4302>

- Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 129. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>
- Rizwanul, I. (2004). Issues in Employment and Poverty Discussion Paper The Nexus of Economic Growth , Employment and Poverty Reduction : An Empirical Analysis. *The Nexus of Economic Growth, Employment and Poverty Reduction: AN Empirical Analysis*, January, 1–39.
- Rusdi, M. (2023). Pengaruh Index Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 971–981.
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 236–255. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Setiyani, M. H., & Kristiyanto, S. (2023). *Rokok, Kebiasaan Merokok dan Angka Kemiskinan di Pulau Jawa*. 08(1), 271–280.
- Sianturi, A. F., Tampubolon, A., Hidayat, N., Nasution, M. D., & Sianturi, R. (2024). Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Medan (2014-2023). *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 739–750. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2606>
- Sukron, I., & Yasin, A. (2021). Pengaruh Ipm, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *INDEPENDENT: Journal Of Economics*, 1, 47–65.
- Widyawati, R. F., Ermatry, H., & Ginting, Andi Lopa; Nainggolan, E. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, populasi penduduk kota, keterbukaan perdagangan internasional terhadap emisi karbon dioksida (co 2 ) di negara asean. *Jambura Agribusiness Journal*, 3(1), 37–47.